KLIPING BERITA MEDIA MASSA

BADAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT

KATA PENGANTAR

Klipping Media Massa adalah kumpulan guntingan berita yang kami sajikan secara rutin. Guntingan berita ini kami seleksi dari berita yang muncul di media cetak. Adapun tema berita yang kami pilih adalah berita yang berkaitan dengan organisasi dan substansi Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan yang berkaitan dengannya.

Kami berharap klipping ini bermanfaat untuk monitoring media BPIW.

Hormat kami

Tim penyusun

DAFTAR ISI

No	Media	Tanggal	News Title	Resume
1	Bisnis Indonesia, Hal 6	Jumat, 17 Januari 2020	Kala Investor Tersandung Tata Ruang	Ambisi Jawa Tengah untuk menarik investasi besar-besaran rupanya tak semudah membalik telapak tangan. Masalah pelik di tubuh pemda menjadi bukti nyata bahwa birokrasi dan kepastian hukum masih perlu dibenahi
2	Bisnis Indonesia, Hal 7	Jumat, 17 Januari 2020	Karma dari Situ yang Tak Diurus	Sempadan sungai jadi tempat tinggal, ruang terbuka hijau jadi perumahan, embung-embung pun berubah peran hingga luasnya berkurang. Banjir pun melanda ibu kota dan sekitarnya. Karma dari keadaan sejak lama
3	Bisnis Indonesia, Hal 19	Jumat, 17 Januari 2020	Berita Foto	Penganugrahan Dokter Kehormatan. Mantan Wakil Presiden, Jusuf Kalla merapikan toga Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono saat penganugrahan Doktor Kehormatan kepada Basuki Hadimuljono di Gedung Aula Barat ITB Bandung, kemarin.
4	Bisnis Indonesia, Hal 19	Jumat, 17 Januari 2020	Sektor Logistis Butuh Dukungan Pengembangan Kawasan	Keberadaan pusat logistic di area sekitar Jalan Tol Trans Sumatera memberikan dampak berantai bagi sektor logistik terutama dampak nilai tambah
5	Media Indonesia, Hal 6	Jumat, 17 Januari 2020	Opini	Praktik Empiris Pemindahan Ibu Kota
6	Media Indonesia, Hal 8	Jumat, 17 Januari 2020	Jawa Barat Bebas Banjir Citarum di 2023	Tahun ini cekungan Bandung terhindar dari genangan. Setelah itu giliran kawasan hilir di Karawang dan Bekasi
7	Koran Tempo, Hal 1	Jumat, 17 Januari 2020	Pemerintah Percepat Penyelesaian Infrastruktur Wisata Prioritas	Pengembangan wisata komersial dan konvensional akan menggenjot devisa
8	Koran Tempo, Hal 3	Jumat, 17 Januari 2020	Menelusuri Jejak Embung yang Lenyap	Dua situ almarhum di Bogor menjadi perumahan
9	Koran Tempo, Hal 4	Jumat, 17 Januari 2020	Telapa Hilang, Banjir Menerjang	Di berbagai lokasi sekitar Jakarta, situ berubah menjadi permukiman
10	Kompas, Hal 13	Jumat, 17 Januari 2020	Destinasi Dipasarkan	Tahun ini, lima destinasi wisata super prioritas siap dipasarkan. Target yang dibidik adalah masa tinggal wisatawan lebih lama dan belanja lebih banyak
11	Kompas, Hal 16	Jumat, 17 Januari 2020	Pengendalian Banjir Bergeser ke Hilir	Pemerintah terus membangun sejumlah infrastruktur pengendali banjir pada aliran sungai Citarum di Jawa Barat
12	Kompas, Hal 16	Jumat, 17 Januari 2020	Pemda Terbentur Dana	Pemerintah daerah terbentur alasan klasik, yaitu keterbatasan dana, yang menghambat upaya revitalisasi kawasan resapan air seperti ruang terbuka hijau dan situ yang hilang

Judul	**Kala Investor Tersandung Tata Ruang**	Tanggal	Jumat, 17 Januari 2020
Media	Bisnis Indonesia, Hal 6		
Resume	Ambisi Jawa Tengah untuk menarik investasi besar-besaran rupanya tak semudah membalik telapak tangan. Masalah pelik di tubuh pemda menjadi bukti nyata bahwa birokrasi dan kepastian hukum masih perlu dibenahi		

Kala Investor Tersandung Tata Ruang

Ambisi Jawa Tengah (Jateng) untuk menarik investasi besar-besaran rupanya tak semudah membalik telapak tangan. Masalah pelik di tubuh pemerintah daerah menjadi bukti nyata bahwa birokrasi dan kepastian hukum masih perlu banyak dibenahi.

Tumpang tindih regulasi hingga proses revisi rancangan tata ruang wilayah (RTRW) di mayoritas kabupaten/kota yang tak kunjung rampung bisa menjadi 'mimpi buruk' rencana percepatan tersebut.

Padahal, dalam Peraturan Presiden (Perpres) No.79/2019 disebutkan dalam 5 tahun ke depan, 270 proyek senilai Rp353,8 triliun (estimasi investasi) akan mengarus ke Jateng. Tanpa kepastian regulasi dan keberadaan RTRW, pelaksanaan proyek-proyek bakal tersendat.

Data yang diperoleh Bisnis menunjukkan, dari 35 kabupaten dan kota di Jateng hanya 6 yang telah merampungkan revisi RTRW. Setentara itu, 29 kabupaten/kota lainnya belum menyelesaikan penuhannya revisi RTRW.

Kabupaten Kendal, salah satu prioritas pembangunan pemerintah, meski telah menyelesaikan harmonisasi tahapan penyusunan, pengesahan RTRW sampai saat ini tak kunjung rampung.

Imbas dari terhambatnya proses pembahasan RTRW menghambat investasi yang akan masuk ke Kabupaten Kendal. Salah satunya adalah pembangunan pabrik baja yang akan menyerap investasi senilai Rp37 triliun. Rencana pembangunan pabrik baja yang telah ada beberapa tahun belakangan terganjal status lahan.

Perpres No. 78/2017 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Kendal, Demak, Ungaran, Salatiga, Semarang, dan Purwodadi menyebutkan pantai berhutan mangrove yang sebagian masuk di Kecamatan Patebon, Kendal, Brangsong, Kaliwungu, dan Cepiring, ditetapkan sebagai kawasan lindung Zona L5.

Sebagai kawasan lindung, lanjut Perpres tersebut, pantai berhutan mangrove atau hutan yang masuk di lima kecamatan tersebut tidak untuk kawasan industri, tetapi hanya untuk kepentingan konservasi biota. Konservasi biota ini mencakup kegiatan perlindungan plasma nutfah, ilmu pengetahuan dan pembangunan pada umumnya.

Pada satu sisi, Pemprov Jateng juga telah menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) No. 16/2019 tentang RTRW Jateng 2009–2029.

Salah satu substansi dalam Perda RTRW tersebut menabrak ketentuan dalam Perpres No. 78/2017 dengan menyebutkan pantai berhutan bakau di Kabupaten Kendal seluas 622 hektare berubah peruntukannya menjadi kawasan industri.

TUMPANG TINDIH

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jateng Prasetyo Aribowo tak menampik kabar soal tersendatnya investasi pabrik baja tersebut.

Saat ditemui di kantornya beberapa waktu lalu, Prasetyo mengungkapkan khusus kasus di Kendal tersebut, memang terjadi karena adanya tumpang tindih kebijakan. Kendati demikian, dia berdalih bahwa kawasan yang akan dijadikan kawasan industri tersebut bukan di wilayah kawasan hutan.

Prasetyo menyebut lahan yang akan dijadikan kawasan industri tersebut bukan bagian dari kawasan hutan, tetapi bagian dari fakta yang menghalangi ke posisi "Maksanya di perda itu, fasanya merupakan kawasan peruntukan industri dan lindung," kata Prasetyo kepada *Bisnis*, Senin (13/1).

Kendal merupakan salah satu kawasan prioritas yang menjadi arahan khusus dari Presiden Joko Widodo untuk dikembangkan sebagai kawasan industri. Pemerintah pusat bahkan telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 85/2019 tentang Pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus Kendal.

Dalam beleid itu, pemerintah menyebut Kendal sebagai salah satu daerah yang dinilai memiliki banyak keunggulan karena ditopang oleh infrastruktur yang cukup komplet mulai dari bandar udara (badara), Tol Trans-Jawa, jalur pantai utara (pantura), serta jalur kereta api ganda Jakarta—Semarang—Surabaya.

"Jadi, nanti kalau Perpresnya berubah, pabrik baja di Kendal juga bisa jalan," ujarnya.

Adapun, Pemerintah Kabupaten Kendal menyelesaikan proses pembahasan Perda RTRW di Kabupaten Kendal telah rampung. Semua tahapan telah selesai, termasuk penetapan bersama dengan DPRD Kabupaten Kendal.

"Sudah selesai, sudah ada kesepakatan dan penetapan bersama Selasa lalu," kata Bupati Kendal Mirna Annisa saat dihubungi *Bisnis*, Kamis (16/1).

Kendati demikian, Mirna menjelaskan raperda RTRW tersebut masih menjalani berbagai tahapan. Setelah disepakati dengan DPRD, raperda RTRW harus dikirim ke Pemprov Jateng untuk dievaluasi oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.

Di Pemprov Jateng, raperda masih harus sinkron dengan kebijakan RTRW Provinsi Jawa Tengah.

"Apakah bertentangan dengan RTRW provinsi atau tidak. Baru kemudian balik ke kami untuk disempurnakan. Kalau perda RTRW sudah disahkan, pabrik baja bisa jalan," tegasnya.

Perkembangan terbaru, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), dari 270 proyek yang disusulkan hanya 107 proyek yang akan masuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020—2024.

Hasil identifikasi Bappenas, sebanyak 107 proyek yang bakal masuk RPJMN dibagi dua kategori, yakni 68 proyek yang telah memiliki keterkaitan dengan *major project* atau proyek utama dan 39 lainnya diakomodasi dalam matriks pembangunan RPJMN 2020—2024.

Dokumen itu juga mengungkapkan bahwa sesuai arahan Presiden Joko Widodo, ada tiga kawasan yang menjadi bagian prioritas percepatan pembangunan.

Pertama, Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Borobudur salah satu proyek utamanya di Borobudur, Airbus, pengembangan Kawasan Industri Kendal (KIK). Ketiga, Pengembangan Kawasan Industri Brebes (KIB).

Perusahaannya dari tiga kawasan prioritas tersebut, daerah yang telah mengesahkan revisi Perda RTRW-nya hanya Kabupaten Brebes. Dalam Perda No. 13/2019, pemerintah Kabupaten Brebes telah mempertegas beberapa aspek tata ruang mulai dari batas wilayah daerah, garis pantai, hingga peta dan peruntukannya.

Untuk kawasan industri, Pemerintah Kabupaten Brebes direncanakan seluas kurang lebih 5.688 hektare (ha) yang meliputi Kecamatan Losari dengan luas kurang lebih 972 ha, Kecamatan Tanjung dengan luas kurang lebih 3.053 ha, dan Kecamatan Bulakamba dengan luas kurang lebih 1.063 ha.

Sementara itu, kawasan prioritas lainnya seperti KSPN Borobudur, wilayah-wilayah yang menjadi bagian dari kawasan prioritas tersebut seperti Kabupaten Magelang dan Kota Magelang, sama sekali belum menyelesaikan proses revisi RTRW.

Dalam data yang diperoleh *Bisnis*, progres pembahasan revisi RTRW di Kabupaten Magelang per 27 Desember 2019 masih dalam proses permohonan rekomendasi dari gubernur.

PERUBAHAN PERPRES

Pemprov Jateng telah melakukan beberapa kali pertemuan untuk menyinkronkan kebijakan antara pusat dan daerah. Dalam kasus Perpres No.78/2017, Pemprov Jateng telah mengusulkan perubahan beleid ke pemerintah pusat.

Perubahan beleid ini penting untuk memutihkan berbagai proyek dan investasi yang akan masuk ke kawasan Jawa Tengah.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang (Pudataru) Provinsi Jateng Eko Yuniarto mengungkapkan, proses pengajuan revisi Perpres No. 78/2017 telah sampai di Sekretariat Kabinet (Setkab). Eko juga menyanggah bahwa substansi antara Perpres dan Perda RTRW saling bertentangan.

Perda No. 16/2019, menurut Eko, sebenarnya sudah cukup untuk menjadi rambu-rambu antara pusat dan daerah, dalam hal ini Provinsi Jateng. Dengan demikian, keinginan untuk mengembangkan kawasan industri sudah bisa diakomodir dengan perda tersebut. "Tinggal kita menunggu perpres-nya jadi, biar clear," ujarnya.

Adapun di Setkab, progres revisi tentang Perpres No. 78 /2017 tersebut akan dibahas dengan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Bidang Perekonomian dan Kementerian Perindustrian termasuk kementerian dan lembaga lainnya.

Berbeda dengan Perpres Kendal yang menyebut bahwa dengan RTRW pun cukup untuk merealisasikan investasi yang masuk di kawasan tersebut, Eko justru berpendapat sebaliknya.

Dia mengatakan pengembangan termasuk pembangunan Kawasan Industri Kendal sangat ditentukan dengan proses revisi Perpres tersebut. "Jadi, itu [kawasan industri] belum bisa dioperasionalkan sepanjang itu [perpres] belum selesai. Ini [investasi] semuanya, tidak hanya baja," jelasnya.

Pihak pengelola Kawasan Industri Kendal (KIK) enggan mengonfirmasi mengenai perkembangan kawasan industri, investasi, dan KEK Kendal.

Didik Purbadi, Executive Director PT Kendal Industrial Park (KIP), justru meminta Bisnis menanti penjelasan ke pihak Gubernur Ganjar dan Bupati Kendal terlebih dahulu. "Ini terkait dengan regulasi dari pemerintah, untuk memacu pengembangan ekonomi di Jateng," ujarnya.

DAN...INVESTASI PUN MELAYANG

Ruwetnya birokrasi masih melekat di dalam benak investor jika menyebut negara seperti Indonesia. Bukti mutakhir adalah terdapatnya sejumlah investasi yang seharusnya bergulir di Provinsi Jateng terpaksa boleh dibilang gagal lantaran RTRW belum siap. Selain itu, tumpang tindih regulasi kian memperpanjang daftar ketidakpastian hukum di negeri ini.

Progres Legislasi Revisi RTRW Kab/Kota di Jateng*

- 35 kabupaten/kota di Jateng telah melakukan revisi RTRW.
- 32 kab/kota telah memohonkan rekomendasi gubernur melalui Dinas PU SDA TARU Jateng.
- 29 kab/kota telah mendapatkan rekomendasi gubernur dan sedang melakukan proses persuk di Kementerian ATR/BPN.
- 5 kab/kota telah memiliki Perda RTRW yang baru.
- 10 kab/kota telah mendapatkan persuk dari Kementerian ATR/BPN.
- 3 kab/kota sedang memproses paripurna dengan DPRD menuju proses evaluasi gubernur (Demak, Sragen dan Kendal).
- 1 kab/kota sedang memproses evaluasi gubernur (Kota Magelang).
- 1 kab/kota telah mendapat SK Ev Gubernur tinggal penetapan Perda (Brebes).

Judul	**Karma dari Situ yang Tak Diurus**	Tanggal	Jumat, 17 Januari 2020
Media	Bisnis Indonesia, Hal 7		
Resume	Sempadan sungai jadi tempat tinggal, ruang terbuka hijau jadi perumahan, embung-embung pun berubah peran hingga luasnya berkurang. Banjir pun melanda ibu kota dan sekitarnya. Karma dari keadaan sejak lama		

▸ BENCANA BANJIR

Karma dari Situ yang Tak Diurus

Sempadan sungai jadi tempat tinggal, ruang terbuka hijau (RTH) berubah jadi perumahan, embung-embung pun berganti peran hingga luasnya berkurang, bahkan hilang entah di mana. Banjir melanda ibu kota dan daerah sekitarnya. Karma dari kealpaan sejak lama.

Aziz Rahardyan
redaksi@bisnis.com

Hal itu diakui oleh segenap pemangku kepentingan yang berwenang mengatasi bencana banjir di Jabodetabek.

Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Ciliwung-Cisadane Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Bambang Hidayah menjelaskan setidaknya ada 15 situ/embung yang hilang di kawasan Jabodetabek.

Bambang memaparkan bahwa pengelolaan situ/embung sebelumnya merupakan wewenang pemerintah daerah.

Namun, setelah diambil alih oleh pemerintah pusat mulai 2007-2008 sesuai amanat UU SDA No. 7/2004, tampak bahwa kebanyakan embung/situ di daerah penyangga Ibu Kota ini tak terawat.

"Tahun kemarin, baru 62 situ yang kami inventarisasi. Sebanyak 62 situ itu sebagian sudah alih fungsi sudah menciut lahannya. Situnya masih ada. Tapi yang 15 itu tidak ada, tidak ditemukan," ujarnya ketika dikonfirmasi *Bisnis*, Kamis (16/1).

Menurutnya, hal ini pun akibat data total 206 situ yang diterima dari pemerintah daerah itu, hanya tercantum nama situ dan data luasan. Tak ada gambaran situasi, koordinat, atau peta situasi. Pihaknya harus mencari sendiri.

"Kami lakukan inventarisasi, pengukuran, dan pematokan, karena kami ingin merevitalisasi situ-situ yang ada. Jangan sampai ini menciut lagi, habis, apakah alih fungsi menjadi permukiman, gedung-gedung, supermarket," tambahnya.

Bambang meyakini bahwa situ-situ di Jabodetabek yang berkurang luasnya atau hilang ini akibat selama ini tidak dipelihara, proses sedimentasi pun terus berjalan, hingga menjadi daratan.

Akhirnya, masyarakat memanfaatkan daratan untuk bercocok tanam, lama-lama dimiliki secara legal. Punya sertifikat. Inilah yang akhirnya mendorong proses jual-beli, sehingga penggunaan lahan bergeser menjadi kawasan perumahan atau usaha.

Hal senada diungkap Direktur Penertiban Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Andi Renald dalam diskusi di Kampus UI, Jakarta, Rabu (15/1).

Andi mengungkapkan, terdapat setidaknya 788 titik penggunaan lahan yang tidak sesuai rencana tata ruang di Jabodetabek, berdasarkan hasil audit tata ruang yang digelar pihaknya.

Menurutnya, penguasaan tanah yang tak sesuai kegunaan inilah yang menyebabkan biaya proyek-proyek penanganan banjir semakin mahal. Pemerintah mau tak mau harus mengganti rugi, sebab masyarakat memang punya hak atas sertifikat yang dimiliki.

Oleh karena itu, koordinasi lintas wilayah, integrasi program, dan perkumpulan para pakar untuk memberikan advice diperlukan. Bahkan, apabila perlu, mencantumkan kriteria perizinan yang lebih ketat untuk bangunan terkait dengan banjir, seperti koefisien *run off* atau intensitas aliran air hujan yang jatuh ke saluran.

"Perizinan harus kita perketat. Berapa *run off* sebelum pembangunan [harus dicatat]. *Before-after* kemampuan di situ berapa, kemudian bilang setelah pembangunan, '[koefisien *run off*] harus tetap segini!' Harus kita kawal. Kalau tidak, *kasih* disinsentif," tegasnya.

Andi menjamin bahwa 'bobolnya' perizinan hingga keluarnya sertifikat lahan yang tak sesuai penggunaan, akan terus diminimalisasi. Dirinya mengaku telah bekerjasama dengan KPK dan kini fokus menyisir kembali pelanggaran jenis ini lewat audit tata ruang di kawasan Puncak, Bogor.

SUDAH TELANJUR

Jakarta dan kota penyangganya harus memutar otak lebih keras terkait dengan pelanggaran tata ruang ini. Pasalnya, yang melanggar sudah 'telanjur banyak'.

Hal ini diungkap Kepala Dinas Cipta Karya, Pertanahan, dan Tata Ruang DKI Jakarta Heru Hermawanto ketika dikonfirmasi *Bisnis*, Kamis (16/1).

Wali Kota Tangerang Arief Rachadiono Wismansyah mengungkap hal serupa. Dirinya berharap pengelolaan situ/embung lebih baik dikembalikan ke pemerintah kota.

"Yang jadi masalah, aset situ punya provinsi, yang mengelola pemerintah pusat, BBWSCC. Sebenarnya pemkot meminta, ya *udah* serahkan saja ke kota, asetnya kita yang rawat kita. Tinggal pusat meng-*advice* begitu, daripada *ilang* begini," ungkapnya.

Judul	**Berita Foto**	Tanggal	Jumat, 17 Januari 2020
Media	Bisnis Indonesia, Hal 19		
Resume	Penganugrahan Dokter Kehormatan. Mantan Wakil Presiden, Jusuf Kalla merapikan toga Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono saat penganugrahan Doktor Kehormatan kepada Basuki Hadimuljono di Gedung Aula Barat ITB Bandung, kemarin.		

PENGANUGERAHAN DOKTOR KEHORMATAN

Antara/Raisan Al Farisi

Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (*kiri*) merapikan topi toga Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono (*tengah*) disaksikan Rektor ITB Kadarsah Suryadi saat penganugerahan Doktor Kehormatan kepada Basuki Hadimuljono di Gedung Aula Barat ITB, Bandung, Jawa Barat, Kamis (16/1). ITB memberikan gelar tersebut kepada Basuki atas sumbangsihnya dalam bidang infrastruktur sumber daya air dan infrastruktur tahan gempa. Basuki disebut selalu berhasil dalam menyelesaikan berbagai proyek infrastruktur yang sangat kompleks.

Judul	**Sektor Logistis Butuh Dukungan Pengembangan Kawasan**	Tanggal	Jumat, 17 Januari 2020
Media	Bisnis Indonesia, Hal 19		
Resume	Keberadaan pusat logistic di area sekitar Jalan Tol Trans Sumatera memberikan dampak berantai bagi sektor logistik terutama dampak nilai tambah		

TOL TRANS SUMATRA

Sektor Logistik Butuh Dukungan Pengembangan Kawasan

Bisnis, JAKARTA — Lembaga pendidikan dan riset logistik Supply Chain Indonesia (SCI) menilai keberadaan pusat logistik dan kawasan industri di area sekitar jalan tol Trans Sumatra akan memberikan dampak berantai bagi sektor logistik.

Chairman SCI Setijadi mengatakan operasional jalan tol di Sumatra perlu segera dilengkapi dengan prasarana dan sarana logistik agar memberikan nilai tambah, baik bagi operator jalan tol maupun pelaku usaha logistik. Dia menilai, rencana pembangunan pelabuhan kering (*dry port*) dan kawasan industri di Panjang, Lampung merupakan langkah tepat.

"Membangun *dry port* itu ide yang bagus dan ideal. Kesempatan membangun pusat logistik di Sumatra lebih bagus karena lahannya relatif lebih luas ketimbang di Jawa," jelasnya kepada *Bisnis*, Kamis (16/1).

Sebagaimana diketahui, saat ini jalan tol Trans Sumatra sudah membentang sepanjang 329 kilometer, mulai dari Bakauheni hingga Lampung. Dalam waktu dekat, jalan tol sepanjang 33 kilometer dari Kayu Agung menuju Palembang juga bakal rampung.

Setijadi menuturkan, keberadaan jalan tol di Sumatra secara langsung bakal berdampak terhadap sektor logistik. Dia menyebut, jalan tol dipastikan bakal memangkas waktu tempuh dan mengurangi risiko kemacetan. Untuk lintasan Bakauheni-Kayu Agung, waktu tempuh diestimasi mencapai 5,4 jam, jauh lebih singkat dibandingkan dengan melalui jalan nasional yang bisa mencapai 12 jam.

Dengan waktu tempuh yang lebih singkat, mobilisasi barang dinilai bakal lebih cepat. Setijadi mengungkapkan, Lampung dan Sumatra Selatan yang kaya dengan hasil bumi diperkirakan akan merangsang permintaan terhadap kegiatan pergudangan, bongkar muat, dan pengemasan.

"Di sekitar jalan tol bisa dibuat kawasan *integrated logistic center*. Ketika *integrated*, ada penciptaaan nilai tambah, misalnya *packaging* hasil perkebunan, bisa diproses di kawasan itu," jelasnya.

GANDENG 2 BUMN

Untuk diketahui, rencana pembangunan *dry port* di Panjang sudah dilansir PT Hutama Karya (Persero) sejak akhir tahun lalu. Direktur Utama Hutama Karya Bintang Perbowo mengatakan perseroan bakal menggandeng dua badan usaha milik negara (BUMN) dalam mewujudkan rencana tersebut.

"Kami akan kerja sama dengan Pelindo II dan PTPN VII untuk pengembangan *dry port*. Kami siapkan akses dari Pelabuhan Panjang ke *dry port* tersebut," ujarnya.

Bintang menuturkan, kebutuhan lahan akan dipasok dari kebun PTPN VII yang sudah tidak produktif. Luas lahan yang bisa dimanfaatkan berkisar 200 hektare hingga 500 hektare.

Pengembangan kawasan bisa diperluas dengan memanfaatkan lahan milik PTPN VII yang seluas 200 hektare hingga 500 hektare.

Tanah tersebut merupakan lahan perkebunan yang sudah tidak produktif. Pengembangan kawasan tersebut dalam jangka panjang diharapkan bisa menunjang trafik lalu lintas di jalan tol Trans Sumatra yang dikelola Hutama Karya.

Untuk diketahui, jalan tol Bakter (140,9 kilometer) sudah beroperasi sejak Maret 2019 sedangkan jalan tol Terpeka (189 kilometer) pada Desember 2019. Tarif terjauh (*barrier to barrier*) jalan tol Bakter mencapai kisaran Rp112.500 hingga Rp224.500 tergantung golongan kendaraan.

Sementara itu, tarif terjauh jalan tol Terpeka berkisar Rp170.500 s.d Rp341.000. Dengan kata lain, untuk menempuh perjalanan dari Bakauheni menuju Kayu Agung secara penuh, pengemudi kendaraan perlu merogoh kocek Rp283.000 hingga Rp565.500.

Setijadi menuturkan, tarif yang dipatok operator jalan tol Trans Sumatra akan menentukan animo dari pengguna jalan tol. Dia menyebut, perhitungan aspek kesediaan membayar dan kemampuan membayar dalam penentuan harus cermat.

"Tarif yang terlalu mahal akan membuat jalan tol tidak menjadi pilihan bagi perusahaan angkutan. Jadi harus dicermati jangan sampai terlalu tinggi," jelasnya. (Oliver Mackenzi)

Judul	**Opini**	Tanggal	Jumat, 17 Januari 2020
Media	Media Indonesia, Hal 6		
Resume	Praktik Empiris Pemindahan Ibu Kota		

Praktik Empiris Pemindahan Ibu Kota

Siswanto
Peneliti P2 (Pusat Penelitian) Politik LIPI

PEMINDAHAN ibu kota yang dilakukan sejumlah negara dapat menjadi rujukan pemindahan ibu kota yang sedang disiapkan pemerintahan Jokowi. Negara-negara yang sudah melakukan pemindahan ibu kota, seperti Amerika Serikat, Malaysia, Brasil, Nigeria, dan Myanmar.

Walaupun kasus pemindahan ibu kota di negara lain memiliki perbedaan konteks ruang dan waktu serta tingkat keberhasilannya, pengalaman negara lain tetap penting untuk dijadikan pelajaran.

Dari pengalaman empiris negara-negara lain terdapat sejumlah alasan yang mendorong pemindahan ibu kota suatu negara. Berbagai alasan yang ada tersebut, antara lain kepadatan penduduk, representasi wilayah, ancaman keamanan, kondisi geografi tidak menguntungkan, mencari kompromi politik, serta pemisahan sentra pemerintahan dan sentra ekonomi.

Motif ekonomi

Kasus pemindahan ibu kota di Brasil menarik untuk disimak karena bersinggungan dengan Indonesia. Brasil sudah melakukan pemindahan ibu kota dua kali. Pemindahan ibu kota pertama dilakukan pada abad ke-18. Pada masa itu ekonomi Brasil didukung perdagangan gula sehingga pemerintah Brasil pada masa itu menetapkan Salvador sebagai ibu kota karena dekat dengan pusat perkebunan tebu pada masa itu.

Ketika pemerintahan kolonial Belanda di Indonesia berhasil mengembangkan tanaman dan industri gula yang lebih canggih, perkebunan tebu kolonial di Karibia umumnya dan Brasil khususnya terancam. Tanaman dan industri gula di Brasil dinilai sudah tidak mampu bersaing melawan kekuatan industri gula Hindia Belanda yang memiliki keunggulan komparatif khususnya di Jawa.

Saat penambangan emas mulai *booming*, timbul pemikiran untuk memindahkan pusat pemerintahan kolonial di Brasil ke wilayah yang dekat dengan wilayah tambang. Pada 1763, pemerintah kolonial di Brasil memindahkan ibu kota dari Salvador ke Rio de Janeiro. Pemindahan ibu kota dari mendekati perkebunan tebu bergerak mendekati penambangan emas. Jadi, motif pemerintah kolonial di balik pemindahan ibu kota selalu kepada motif ekonomi. Hanya saja, terdapat perubahan dari ekonomi perkebunan kepada ekonomi tambang.

Dalam perkembangannya, Rio de Janeiro dinilai terlalu kecil menjadi ibu kota Brasil karena sudah tidak mampu lagi mendukung pertumbuhan penduduk dan perkembangan kota. Kota Rio de Janeiro menjadi kota urban yang ramai sehingga kriminalitas dan kemiskinan menjadi ciri kota tersebut.

Salah satu kerusuhan bersejarah ialah ketika penduduk menolak kebijakan vaksin dari pemerintah yang menyebabkan revolusi vaksin pada 1904 dan hampir menjatuhkan pemerintahan Presiden Rodrigues Alves karena kebijakan vaksin berkembang menjadi kudeta.

Di samping itu, Kota Rio de Janeiro juga rawan dari segi keamanan. Warga kota merasa kriminalitas menjadi ancaman nyata. Pemerintah Brasil mulai berpikir kembali tentang memindahkan ibu kota. Akhirnya, pemindahan ibu kota dilakukan mulai 1954 dan selesai selama enam tahun. Pemindahan pusat pemerintah Brasil dari Rio de Janeiro ke Brasilia terjadi di era kepemimpinan Presiden Juscelino Kubitschek de Oliveira pada 1960. Negara ini melaksanakan pindah ibu kota yang kedua kali.

Kesenjangan sosial

Kebijakan pemindahan ibu kota di Brasil juga dipengaruhi faktor wilayah yang kurang merepresentasi suatu negara secara keseluruhan. Letak Rio de Janeiro dinilai kurang menjangkau seluruh wilayah Brasil yang luas. Di Brasilia, ibu kota baru, muncul penduduk strata bawah. Penduduk Brasilia yang direncanakan hanya untuk 500 ribu penduduk, kini memiliki 2,2 juta pendatang yang tinggal di kota-kota sekitar. Akibatnya, kesenjangan kelas dan kelompok sosial Brasil masih kentara jelas di ibu kota baru tersebut.

Aspek estetika dari Kota Rio de Janeiro jika dibandingkan dengan Kota Brasilia tidak berimbang. Rio de Janeiro sebagai kota tua tempat diawalinya kedatangan bangsa Portugal ke benua Amerika sehingga meninggalkan peninggalan sejarah yang penting dan indah. Bahkan, Rio de Janeiro dikukuhkan sebagai arsitektur dunia untuk tahun 2020 oleh UNESCO.

Pengakuan dunia kepada Kota Rio de Janeiro sebagai ibu kota arsitektur dunia sebagai gambaran betapa bangunan dan arsitektur yang gemilang.

Kota Rio de Janeiro sebagai kota urban berhasil memper tahankan peninggalan sejarah yang bernilai tinggi agar identitas dan gambaran masa lalu tetap bisa dirasakan masyarakat di era sekarang.

Faktanya, banyak kota yang gagal menjaga indentitas masa lalunya karena gagal juga menjaga warisan sejarah. Karena pertimbangan bisnis, banyak gedung-gedung tua dan bersejarah dikorbankan. Akibatnya, masyarakat modern kehilangan referensi untuk memandang peradaban masa lalu yang menaungi kota tersebut.

Brasil, negara yang berpengalaman dalam pemindahan ibu kota. Negara ini melakukan pemindahan di masa kolonial dan masa kemerdekaan. Pemindahan ibu kota di Brasil dilakukan karena motif ekonomi, keamanan, kepadatan penduduk, dan representasi wilayah. Oleh karena itu, negara ini bisa diminta berbagi pengalaman terkait dengan pemindahan ibu kota tersebut.

Hal itu bisa dilakukan dengan mengirim para pihak terkait untuk berkunjung ke Brasil mengumpulkan informasi. Atau, sebaliknya kon sultan dari Brasil diundang untuk memberi masukan kepada Indonesia yang sedang merencanakan pemindahan ibu kota.

Judul	**Jawa Barat Bebas Banjir Citarum di 2023**	Tanggal	Jumat, 17 Januari 2020
Media	Media Indonesia, Hal 8		
Resume	Tahun ini cekungan Bandung terhindar dari genangan. Setelah itu giliran kawasan hilir di Karawang dan Bekasi		

Jawa Barat Bebas Banjir Citarum di 2023

Tahun ini cekungan Bandung terhindar dari genangan. Setelah itu giliran kawasan hilir di Karawang dan Bekasi.

Cikwan Suwandi
cikwan@mediaindonesia.com

DALAM beberapa kesempatan, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono menjanjikan akan segera membenahi daerah di hilir Sungai Citarum. "Setelah hulu dibenahi, pemerintah akan menuju Karawang," janjinya.

Target dia, pembenahan di wilayah hulu, seputar Kabupaten Bandung, bisa tuntas pada tahun ini. Setelah itu, kementerian yang dipimpinnya akan bergerak membenahi Sungai Cibeet, di antaranya dengan membangun Waduk Cibeet di Kabupaten Karawang.

Tekad pemerintah itu membuat Bupati Karawang Cellica Nurrachadiana bungah. "Pembangunan bendungan akan mampu menyelesaikan persoalan banjir yang terjadi di Karawang akibat luapan Sungai Cibeet," ujarnya optimistis, kemarin.

Cellica mengaku sudah bertemu Gubernur Jawa Barat Riwan Kamil terkait rencana pembangunan waduk. "Hanya saja, saya belum tahu teknisnya, termasuk lokasi pembangunan waduk."

Di Jawa Barat, Emil menyatakan Kementerian PU-Pera dan pihaknya menjalankan 9 program mitigasi bencana banjir. Salah satunya membangun Bendungan Cibeet yang dianggarkan senilai Rp800 miliar. Waduk itu akan menghindarkan Karawang dan Bekasi dari banjir besar.

Seusai bertemu dengan gubernur dan 9 bupati serta wali kota yang wilayahnya berada di aliran Citarum di Bandung, kemarin, Menteri Basuki kembali menegaskan target pemerintah membereskan penanganan banjir di aliran Sungai Citarum pada 2023. Pembangunan infrastruktur pun dikebut.

"Banjir di kawasan hulu telah bisa dikendalikan dengan Terowongan Air Curug Jompong di Kabupaten Bandung. Setelah itu, pekerjaan sodetan Sungai Cisangkuy, anak sungai Citarum, yang akan tuntas April ini," jelasnya.

Sodetan tuntas maka penanganan kawasan hulu dinilai 100% beres. Banjir cekungan Bandung bisa dikendalikan tahun ini.

"Setelah itu Karawang dan Bekasi. Kami sudah memulainya dengan membangun waduk dan normalisasi sungai di hulu, di wilayah Bogor. Selanjutnya Bendungan Cibeet dan kalau perlu membangun bendungan Cijuray," tandasnya.

Banjir Surabaya

Terkait dengan banjir di Surabaya, Jawa Timur, Menteri Basuki memastikan penyebabnya bukan karena pintu air dan aliran sungai. "Semuanya dalam kondisi normal dan baik. Tidak ada hambatan laju air sedikit pun."

Dia mengaku sudah mengerahkan anak buah untuk meneliti penyebab banjir di kota yang dipimpin Tri Rismaharini itu. "Ketinggian air di sungai saat banjir dalam kategori biasa. Tidak ada situasi darurat dalam sungai," tegasnya.

Basuki menduga banjir di Surabaya itu terjadi karena drainase kota yang jelek.

Dari Pangkalpinang, Bangka Belitung, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Mikron Antariksa menyatakan, untuk mengurangi banjir, pihaknya membutuhkan pompa air dan peralatan pendukung lain. "Pompa air untuk memindahkan air ke tempat yang lebih memungkinkan. Saat ini kami juga butuh alat keruk apung untuk menangkat sedimen di sejumlah sungai," paparnya.

Dia menyayangkan saat ini peralatan yang dibutuhkan itu belum tersedia. "Beberapa instansi baru akan melakukan pengadaan peralatan."

Dari sejumlah wilayah, kemarin, dilaporkan bahwa persiapan melakukan penanganan bencana banjir terus dilakukan. (BY/RF/SS/PO/RS/YH/YK/LD/OL/AS/UL/AD/N-2)

Judul	**Pemerintah Percepat Penyelesaian Infrastruktur Wisata Prioritas**	Tanggal	Jumat, 17 Januari 2020
Media	Koran Tempo, Hal 1		
Resume	Pengembangan wisata komersial dan konvensional akan menggenjot devisa		

EKONOMI DAN BISNIS

Pemerintah Percepat Penyelesaian Infrastruktur Wisata Prioritas

Penggabungan wisata komersial dan konvensional akan menggenjot devisa.

SENIN, 17 JANUARI 2020

Pantai Kuta Mandalika, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, Desember 2019. ANTARA/Hanviyan Perdana Putra

JAKARTA – Pemerintah mempercepat penyelesaian infrastruktur penunjang lima destinasi pariwisata super-prioritas, yaitu Danau Toba (Sumatera Utara), Candi Borobudur (Jawa Tengah dan Yogyakarta), Mandalika (Nusa Tenggara Barat), Labuan Bajo (Nusa Tenggara Timur), dan Likupang (Sulawesi Utara).

Menurut Asisten Deputi Investasi Kementerian Pariwisata, Hengky Manurung, target yang sudah direncanakan akan dibangun dengan anggaran negara, tahun ini harus segera terealisasi. "Semua proyek dengan dana total Rp 11 triliun wajib dieksekusi pada tahun ini. Presiden yang minta," kata dia di Hotel JS Luwansa, Jakarta Selatan, kemarin.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengucurkan anggaran sebesar Rp 8,8 triliun. Kementerian Perhubungan mengembangkan konektivitas di lima destinasi dengan anggaran Rp 2,95 triliun. Sedangkan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bertugas memperkuat sumber daya manusia serta promosi dengan pendanaan Rp 5,27 triliun.

Hengky memastikan lembaganya menggandeng pemodal swasta, baik dari dalam maupun luar negeri, untuk memperkuat pembiayaan. "Cakupannya tak hanya proyek fisik seperti jalan dan rumah, tapi juga pendampingan untuk usaha kecil di sekitarnya," tutur dia.

Ada juga pengembangan produk wisata untuk menggenjot devisa. Paket wisata elite dengan tujuan bisnis (meeting, incentive, convention, and exhibition/MICE), kata Hengky, bisa dipadukan dengan pelancongan konvensional. Tujuannya untuk meningkatkan masa tinggal pelancong yang saat ini rata-rata tiga hari dua malam. "Kami ingin perpanjang hingga 10 hari. Devisa yang diperoleh sekitar US$ 1.500-2.000 per orang," katanya.

Wakil Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Bidang Promosi, Budi Tirtawisata, menilai kunjungan turis MICE sudah menguntungkan. Mereka akan membayar keperluan akomodasi dan kuliner hingga US$ 400-450 per hari atau setara Rp 5,6-6,3 juta sehari. Sedangkan mayoritas turis konvensional menghabiskan US$ 150 atau sekitar Rp 2,1 juta sehari. "Kontribusi belanja MICE 25 persen, tapi persentase jumlah turis asing kurang dari 5 persen," katanya.

Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR, Danis Sumadilaga, mengatakan pengerjaan proyek di Danau Toba paling cepat selesai. "Konstruksi dikerjakan pada Maret 2020, setelah lelang selesai."

Dari total pendanaan PUPR untuk wisata prioritas pada tahun ini, alokasi anggaran di Danau Toba sebesar Rp 2,46 triliun. "Porsinya paling besar ke proyek jalan dan permukiman," ucap Danis.

Di sisi lain, Ketua Tim Percepatan Wisata Mandalika, Ari Suhendro, mengatakan perlu dana sekitar Rp 1,9 triliun untuk berbagai proyek di lahan seluas 1.200 hektare ini. Selain bandara dan dermaga, kata Ari, timnya sedang mengembangkan berbagai tipe hunian elite dan konvensional. "Ada juga proyek sosial berupa pelatihan masyarakat untuk atraksi." **FRANSISCA CHRISTY ROSANA | YOHANES PASKALIS PAE DALE**

Modal Mengalir ke Lima Destinasi

Kementerian Pariwisata menjaring modal swasta untuk membangun infrastruktur lima destinasi pariwisata prioritas. Berikut ini arus investasi yang masuk ke lima destinasi wisata hingga semester pertama tahun lalu.

Investasi Destinasi Wisata (US$ Juta)

	Modal Asing	Investasi Domestik
Danau Toba		
2017	25,9	10,18
2018	3,7	0,72
2019*	2,7	2,29
Borobudur		
2017	25,8	82,04
2018	7,9	89,6
2019*	1,3	81,3
Mandalika		
2017	86,2	20,9
2018	41,8	1,8
2019*	33,7	39,01
Labuan Bajo		
2017	36,4	5,9
2018	34,2	3,9
2019*	10,2	16,3
Likupang		
2017	28,3	6,8
2018	46,4	34,5
2019*	3,25	4,9

YOHANES PASKALIS PAE DALE | SUMBER: KEMENTERIAN PARIWISATA | *PERIODE JANUARI-JUNI 2019

Judul	**Menelusuri Jejak Embung yang Lenyap**	Tanggal	Jumat, 17 Januari 2020
Media	Koran Tempo, Hal 3		
Resume	Dua situ almarhum di Bogor menjadi perumahan		

METRO

Menelusuri Jejak Embung yang Lenyap

Dua situ almarhum di Bogor telah menjadi perumahan.

SENIN, 17 JANUARI 2020

Wakil Bupati Tangerang Mad Romli bersama jajarannya saat meninjau Situ Garugak yang masih ada di Kecamatan Kresek. Dok Pemkab Tangerang

JAKARTA - Gajah mati meninggalkan gading, situ raib tinggallah nama. Lihat saja nasib Situ Asem. Embung di kawasan Semplak, Kota Bogor, tersebut merupakan satu dari 15 situ yang dinyatakan raib oleh Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung-Cisadane, badan di bawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Kemarin, Tempo menjelajahi Semplak dari ujung ke ujung. Hasilnya, nihil. Padahal, menurut data Balai Besar Sungai, luas asli Situ Asem mencapai 3 hektare-nyaris setara alun-alun yang baru diresmikan di Depok.

Sedikit petunjuk datang dari Haji Andi, lurah Mekarwangi, Kecamatan Tanah Sareal. "Saya mengetahui Situ Asem hanya sebagai nama kampung di Mekarwangi," ujar dia. Dia mengatakan Kampung Situ Asem berada di wilayah Rukun Warga 15 yang terbagi dalam lima rukun tetangga. "Tapi tak ada situ di sana."

Muhamad Djafar, 57 tahun, warga Situ Asem RT 4 RW 15, mengatakan tidak mengetahui keberadaan situ di sana. Namun, saat dia kecil, memang ada cekungan di dekat kampungnya. Lokasi itu yang sudah lama kering dan kerap ditanami padi. Dia memperkirakan bekas balong itu kini menjadi bagian Perumahan Taman Sari Persada. "Lokasi itu memang sering banjir," ujar dia.

Nasib serupa pun dialami Situ Salam di Kelurahan Ciparigi, Bogor Utara. Embung yang dulunya terbentang seluas 1 hektare itu kini almarhum. "Memang dulu ada, tapi sekarang sudah hilang," kata Ujang Hamid, 54 tahun, warga Kampung Ciparigi.

Revitalisasi oleh BBWS 2019

Nama	Luas*	Lokasi
Situ Citata	10,8	Cibinong, Kab. Bogor
Situ Telaga Saat	5,8	Kab. Bogor
Situ Rawa Pulo	5,2	Kota Bekasi
Rawa Kalong	6,8	Kota Depok

*Dalam hektare

Revitalisasi oleh BBWS 2019

Judul	**Telapa Hilang, Banjir Menerjang**	Tanggal	Jumat, 17 Januari 2020
Media	Koran Tempo, Hal 4		
Resume	Di berbagai lokasi sekitar Jakarta, situ berubah menjadi permukiman		

METRO

Telaga Hilang, Banjir Menerjang

Di berbagai lokasi sekitar Jakarta, situ berubah menjadi permukiman

JAKARTA – Sejumlah telaga di kawasan kota penyangga Jakarta ditengarai hilang. Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung-Cisadane menduga ada 15 situ yang tersebar di Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kabupaten Tangerang, hingga Depok yang hilang dan beralih fungsi.

Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung-Cisadane Bambang Hidayah menengarai sederet balong tersebut hilang karena mengering dan beralih fungsi. "Sebagian telah berubah jadi gedung atau rumah," ujar dia ketika dihubungi Tempo, kemarin.

Menurut Bambang, jumlah situ di Jakarta dan kota penyangganya pada 1960-an diperkirakan mencapai 400-600. Saat itu, pengelolaan lahan berada di bawah pemerintah daerah masing-masing. Selepas terbitnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, pengelolaan telaga di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi menjadi tanggung jawab Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Pemerintah daerah pun menyerahkan pengelolaan sekitar 206 telaga itu kepada Kementerian.

Balai Besar Sungai kemudian memverifikasi lokasi situ. Terdapat 185 telaga yang teridentifikasi. Dari jumlah tersebut, sebanyak 62 sudah tercatat batas-batasnya dan dipasangi patok. Adapun 15 telaga diduga hilang dan sisanya belum terdata.

Bambang mengatakan telaga itu beralih fungsi karena sedimentasi atau pendangkalan yang kemudian menjadikannya bagian dari daratan. Setelah itu, masyarakat menanami atau membangun hunian di sana.

Selain beralih fungsi, dia menambahkan, sebagian situ mengalami penyusutan luas. Contohnya, Situ Gunung Putri, Citeureup, Kabupaten Bogor, yang semula 10 hektare tersisa 5 hektare. Selisihnya, 13 hektare, telah menjadi hak milik masyarakat dengan bukti kepemilikan girik.

Bambang menjelaskan situ sangat penting untuk program pengendalian banjir bagi Jakarta dan kota penyangganya. Telaga berperan menampung air hujan agar air itu tidak langsung mengalir ke sungai.

Sungai yang tak mampu menampung air hujan, kata Bambang, bakal melimpas dan mengakibatkan banjir. "Jadi kami ingin mempertahankan situ-situ ini untuk membantu pengendalian banjir di Jabodetabek," ujar dia.

Idris menerangkan, dari 26 situ di Depok, kini hanya tersisa 23. Data Balai Besar Sungai menyebutkan salah satu telaga yang hilang itu ialah Situ Cining dengan luas 1,5 hektare. Menurut Idris, situ yang raib kebanyakan beralih menjadi perumahan. Hunian yang dibangun di bekas telaga itu pun legal karena ada sertifikatnya. "Ini menjadi masalah," kata dia.

Pengamat tata kota dari Pusat Studi Perkotaan, Nirwono Joga, mengatakan situ merupakan salah satu sarana pengendalian banjir. Telaga yang terbentuk secara alamiah otomatis menjadi daerah aliran air. "Dengan banyaknya situ, dampak banjir bisa berkurang," ujar dia.

Nirwono tak heran jika pada awal tahun lalu air bah menerjang Jakarta dan kota penyangganya seperti Bekasi, Jawa Barat, 1 Januari lalu. "Jadi waktu Bekasi banjir, enggak heran, karena perumahan-perumahan itu dulunya situ," kata dia.

TAUFIQ SIDDIQ | GANGSAR PARIKESIT

Judul	**Destinasi Dipasarkan**	Tanggal	Jumat, 17 Januari 2020
Media	Kompas, Hal 13		
Resume	Tahun ini, lima destinasi wisata super prioritas siap dipasarkan. Target yang dibidik adalah masa tinggal wisatawan lebih lama dan belanja lebih banyak		

Destinasi Dipasarkan

Tahun ini, lima destinasi wisata super prioritas siap dipasarkan. Target yang dibidik adalah masa tinggal wisatawan lebih lama dan belanja lebih banyak.

JAKARTA, KOMPAS — Pembangunan infrastruktur untuk lima destinasi super prioritas pariwisata ditargetkan tuntas pada tahun ini. Pemerintah fokus meningkatkan jumlah dan lama kunjungan wisatawan, antara lain dengan membidik wisatawan bisnis.

Namun, sejauh ini, kesiapan daerah dan sumber daya dinilai belum optimal untuk menggarap destinasi wisata bernilai tambah.

Lima destinasi pariwisata super prioritas yang ditetapkan pemerintah adalah Borobudur, Danau Toba, Labuan Bajo, Likupang, dan Mandalika. Lima destinasi itu diharapkan mendorong sebaran wisatawan agar tidak hanya terpusat di Bali.

"Tahun ini, lima destinasi tersebut siap dipasarkan dengan berorientasi produk (wisata) sehingga mendorong orang lebih lama tinggal," ujar Asisten Deputi Investasi Pariwisata Kementerian Pariwisata Hengky Manurung dalam Economic Outlook Pariwisata 2020: Sinergi Membangun Destinasi Pariwisata Prioritas yang digelar IDX Channel, Kamis (16/1/2019), di Jakarta.

Strategi pemerintah adalah mendorong kualitas kunjungan dengan masa tinggal lebih lama. Devisa yang diperoleh diharapkan juga meningkat.

Menurut Hengky, pada 2019 diperkirakan ada 16,5 juta kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) ke Indonesia. Target 20 juta pada 2019 tak tercapai. Sementara, rata-rata lama tinggal wisman tujuh hari.

Tahun ini, 17 juta kunjungan wisman dibidik dengan 5 juta orang di antaranya merupakan wisatawan bisnis. Adapun rata-rata masa tinggal ditargetkan 10 hari dengan belanja 1.500 dollar AS-2.000 dollar AS.

"Kami akan menggarap wisatawan bisnis dengan mengawinkan kegiatan bisnis dan paket-paket wisata," katanya.

Berdasarkan Neraca Pembayaran Indonesia, pada 2018 ada 15,891 juta wisman yang datang ke Indonesia dengan nilai belanja perjalanan 16,426 miliar dollar AS. Nilai belanja per wisman 1.034 dollar AS.

Tahun ini, pemerintah pusat menyiapkan anggaran Rp 11 triliun untuk mendukung infrastruktur pengembangan pariwisata.

Wakil Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia Budi Tirtawisata mengemukakan, pengembangan sektor pariwisata bergeser dari peningkatan kuantitas menjadi kualitas. Untuk itu, perlu upaya mengemas destinasi wisata agar bernilai tambah dengan menyiapkan industri, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM), dan menyiapkan daya dukung lingkungan.

"Peran SDM sangat penting untuk memberi nilai tambah dan daya saing di tengah persaingan seluruh negara untuk menarik wisatawan," katanya.

Wisata bisnis

Budi menambahkan, wisata bisnis dari kegiatan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran (MICE) yang dipadukan dengan paket wisata diyakini dapat meningkatkan lama kunjungan dan nilai belanja wisatawan. Pengeluaran wisatawan bisnis lebih tinggi, dengan nilai belanja 3-3,5 kali dari nilai belanja wisatawan biasa. Wisatawan bisnis bisa belanja hingga 2.000 dollar AS per orang.

Sementara, Ketua Umum Gabungan Industri Pariwisata Indonesia Didien Junaedy menyampaikan, pemerintah perlu serius menggarap sumber wisatawan dominan serta destinasi premium dengan produk wisata unggulan.

"Saat ini, wisatawan didominasi asal Asia. Untuk itu, perlu fokus menggarap wisatawan dari Asia agar efektif," katanya.

Kesiapan daerah

Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio menyoroti langkah pemerintah yang mengubah target destinasi unggulan, dari 10 destinasi menjadi 5 destinasi super prioritas. "Apa karena target 10 destinasi unggulan tidak tercapai, maka target dipersempit? Jangan begitulah (tidak konsisten)," katanya.

Agus menambahkan, perlu target dan strategi yang jelas jika ingin mengejar target pariwisata. Pembangunan destinasi pariwisata dinilai tidak cukup hanya dengan menyiapkan infrastruktur, tetapi juga harus diimbangi kesiapan SDM setempat melalui pelatihan agar siap menjadi pelaku wisata.

(LKT/MED/INA)

SHARE

Judul	**Pengendalian Banjir Bergeser ke Hilir**	Tanggal	Jumat, 17 Januari 2020
Media	Kompas, Hal 16		
Resume	Pemerintah terus membangun sejumlah infrastruktur pengendali banjir pada aliran sungai Citarum di Jawa Barat		

Pengendalian Banjir Bergeser ke Hilir

Pemerintah terus membangun sejumlah infrastruktur pengendali banjir pada aliran Sungai Citarum di Jawa Barat.

BANDUNG, KOMPAS — Fokus pengendalian banjir aliran Sungai Citarum bergeser ke hilir. Sejumlah infrastruktur penahan banjir di daerah hilir mulai dikebut dan ditargetkan rampung setidaknya tahun 2024.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono dalam Rapat Evaluasi dan Preventif Banjir di Kawasan Jawa Barat, Kamis (16/1/2020), di Bandung, menyatakan, banjir di kawasan cekungan Bandung sudah bisa dikendalikan. Beberapa infrastruktur, seperti embung dan terowongan Curug Jompong, dianggap berhasil mengurangi dampak banjir yang kerap melanda Kabupaten Bandung.

"Curah hujan tertinggi tanggal 17 Desember lalu tidak menyisakan banjir yang bertahan lama karena (ada terowongan) Curug Jompong. Di samping itu, proyek sodetan Cisangkuy juga sedang dikerjakan, jadi aliran dari hulu sebagai penyebab banjir bisa dikendalikan," tuturnya.

Sementara daerah hilir Citarum, seperti Kecamatan Muaragembong dan Cimalaya di Kabupaten Karawang, menurut Basuki, masih terancam banjir. Untuk itu, pemerintah mulai fokus mengendalikan banjir di daerah hilir Citarum.

"Tahun depan ada usulan pembangunan Bendungan Cibeet dan Cijuray. Keduanya penting, tetapi kami akan lihat mana yang lebih dibutuhkan dalam mengendalikan banjir. Itu yang akan dibangun lebih dulu," ujarnya di hadapan sejumlah kepala daerah se-Jabar.

Gubernur Jabar Ridwan Kamil meminta pemerintah pusat agar dalam membangun infrastruktur tidak hanya mengkaji tataran teknis, tetapi juga aspek sosial sehingga tidak ada warga yang dirugikan.

"Aspek yang akan kami lihat adalah bagaimana bentuk pembangunan akan dilakukan, seperti pembangunan bendungan sungai, normalisasi, hingga pengerukan," tuturnya.

Tanggap darurat

Rapat juga membahas penanganan bencana di Kabupaten Bogor. Basuki menyatakan, pemerintah pusat tetap memberikan bantuan alat berat hingga seluruh kawasan terdampak bisa diakses kembali.

Bupati Bogor Ade Yasin menuturkan, pihaknya memperpanjang status tanggap bencana hingga akhir Januari. Setidaknya terdapat 19.821 pengungsi di empat kecamatan, di antaranya Kecamatan Sukajaya sebanyak 14.233 jiwa, Jasinga 159 jiwa, Nanggung 4.217 jiwa, dan Cigudeg 1.212 jiwa. Selain itu, masih ada dua desa yang belum bisa diakses akibat longsor, yaitu Desa Cileuksa dan Cisarua di Kecamatan Sukajaya.

Sementara itu, sejumlah kecamatan di Purwakarta dan Karawang diprediksi menghadapi bencana banjir dalam tiga hari ke depan. Kepala Bidang Prediksi dan Peringatan Dini Cuaca Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Miming Saepudin mengatakan, hujan dengan intensitas sedang hingga tinggi dan disertai angin kencang bakal terjadi hingga 19 Januari 2020. Umumnya potensi hujan ini terjadi pada sore menjelang malam hari. Warga diminta waspada. (RTG/MEL)

Judul	**Pemda Terbentur Dana**	Tanggal	Jumat, 17 Januari 2020
Media	Kompas, Hal 16		
Resume	Pemerintah daerah terbentur alasan klasik, yaitu keterbatasan dana, yang menghambat upaya revitalisasi kawasan resapan air seperti ruang terbuka hijau dan situ yang hilang		

Pemda Terbentur Dana

Pemerintah daerah terbentur alasan klasik, yaitu keterbatasan dana, yang menghambat upaya revitalisasi kawasan resapan air seperti ruang terbuka hijau dan situ yang hilang.

JAKARTA, KOMPAS — Salah satu upaya antisipasi banjir untuk Jakarta dan sekitarnya adalah dengan merevitalisasi lahan penampungan air dan resapan air. Namun, hingga tahun ini, pemerintah kabupaten dan kota tetangga Jakarta terbentur keterbatasan dana dalam mengembalikan kawasan resapan air seperti ruang terbuka hijau dan situ yang hilang. Di sisi lain, normalisasi dan pembebasan lahan untuk waduk di Ibu Kota juga berjalan lambat karena banyak kendala pembebasan lahan di lapangan.

Sekretaris Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta Dudi Gardesi mengatakan, tahun ini tersedia anggaran pembebasan lahan di beberapa pos yang totalnya hampir Rp 900 miliar di Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta. Anggaran gelondongan ini terbagi untuk pembebasan lahan waduk hingga sempadan sungai.

"Tahun ini kemungkinan untuk Waduk Brigif, Marunda, dan Kampung Rambutan ada yang masih perlu dibebaskan, tetapi pengerjaan sudah jalan," kata Dudi, Kamis (16/1/2020).

KOMPAS/PRIYOMBODO

Foto udara Waduk Pluit dengan latar belakang perairan Teluk Jakarta di Penjaringan, Jakarta Utara, Kamis (16/1/2020). Waduk Pluit merupakan salah satu instalasi perairan yang sangat strategis, terutama dalam pengendalian banjir Jakarta. Letaknya juga berbatasan langsung dengan laut di sisi utara sehingga turut mengendalikan aliran air ke teluk.

Sebelumnya, Kepala Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta Juaini Yusuf mengatakan, dari sekitar 109 waduk dan embung di DKI, normalisasi baru selesai di 16 waduk. Normalisasi waduk yang dilakukan sejak tahun 2013 ini di antaranya membebaskan lahan dari okupasi dan pengerukan.

Waduk yang telah selesai dinormalisasi adalah Waduk Pluit, Ria Rio, Melati, dan Setiabudi. Menurut Juaini, kendala utama normalisasi waduk adalah pembebasan lahan dan sulitnya alat berat masuk karena padatnya permukiman.

Untuk Tangerang, pengembalian kawasan resapan sulit dilakukan karena biaya untuk pembebasan lahan sangat tinggi. Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah mengatakan, saat ini ruang terbuka hijau (RTH) di Tangerang baru 20 persen dari jumlah yang disyaratkan sebesar 30 persen.

Untuk memenuhi angka RTH ideal bagi Kota Tangerang, dibutuhkan 30 persen atau sekitar 45 kilometer persegi dari total luas kota 153,93 kilometer persegi. Jika dibutuhkan dana pembebasan lahan Rp 1 juta per meter persegi, maka dibutuhkan Rp 45 triliun untuk pembebasan lahan. Padahal, APBD Kota Tangerang sekitar Rp 5 triliun satu tahun.

"Kalau kami melakukannya, tidak ada pembangunan di Tangerang," kata Arief.

Saat ini Tangerang berusaha memperbesar daya resap air dengan sumur injeksi yang kedalamannya 30-40 meter. Selama ini biopori dinilai tidak memadai dalam menyerap air dan mencegah banjir. Tangerang memiliki sekitar 10.000 biopori, tetapi banjir juga terjadi pada 1 Januari lalu.

Pendangkalan

Khusus di Depok, menurut catatan pengamat lingkungan perkotaan Ahmad Safrudin, saat ini ada 26 situ seluas 235 hektar. Jumlah itu menurun dibandingkan tahun 2001. Saat itu tercatat terdapat 34 situ.

"Namun, dari 26 situ, yang berfungsi baik hanya enam. Yang lain rusak atau terlalu banyak endapan, baik dari hulu maupun dari sisa limbah masyarakat sekitar," ujar lelaki yang akrab disapa Puput itu.

Menurut dia, semua situ yang ada di Depok berfungsi sebagai resapan air dan memiliki peran strategis meminimalkan risiko banjir. Puput memperkirakan, apabila pemerintah berhasil mengeruk ke-26 situ yang ada di Depok sedalam 2 meter saja, kemampuan lingkungan menampung atau mengurangi aliran air menuju Jakarta meningkat.

Ia menambahkan, fungsi situ di Depok sebagai pengendali banjir Ibu Kota paling signifikan dibandingkan Bogor, Tangerang, dan Bekasi. Di Kabupaten Bogor, Puput mencatat ada 84 situ. Namun, tak semua situ di Bogor terkait dengan sistem resapan air dan pengendalian banjir Jakarta.

Jumlah situ di Depok berkurang karena dikonversi menjadi area permukiman oleh pengembang perumahan dan secara individu. Menurut Puput, kesadaran RT, RW, lurah, dan camat dulu dan kini untuk menjaga atau merawat situ masih rendah. Pemberian sertifikat hak milik ataupun hak guna bangunan dilakukan tanpa mempertimbangkan dampak lingkungan.

Wali Kota Depok M Idris berpendapat, situ-situ di Depok yang dalam kondisi baik mampu mengurangi potensi banjir dari luapan Sungai Angke, Pesanggrahan, dan Ciliwung. Namun, okupasi lahan menggerogoti luas situ. Situ Rawa Besar yang luas sebelumnya sekitar 17 hektar kini tinggal 11 hektar.

Ia menduga sertifikat lahan-lahan situ dulu diterbitkan pihak tak bertanggung jawab. Idris mengatakan, guna mengembalikan RTH dan situ yang hilang, pemerintah pusat perlu membeli lahan resapan dan situ yang telah beralih fungsi. Selain itu, diperlukan kerja kolaborasi antara Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, serta pemerintah daerah untuk mengembalikan kawasan resapan di Jabodetabek. (IRE/AYU)